

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2018



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKIP SEKRETARIAT DPRD
KOTA BALIKPAPAN



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kami panjatkan ke Khadirat Ilahi Robbi, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2018 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang ***Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah***.

Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta system ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Materi Laporan antara lain menguraikan tentang program dan kegiatan yang diselenggarakan serta sasaran yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, juga dimuat inventarisasi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif penyelesaian masalah berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2018 berarti Sekretariat DPRD Kota Balikpapan telah menyelesaikan kegiatannya dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2016-2021 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama tahun 2018, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan untuk tahun 2018 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2018. Sebagai bentuk pertanggung jawaban pada prinsipnya transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders* kami.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

Balikpapan, 26 Februari 2019
Sekretaris DPRD Kota Balikpapan


ABDUL AZIS.AM

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2018 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kota Balikpapan selama Tahun 2018 yang merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain itu LKjIP juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKjIP Tahun 2018 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang peningkatan kapasitas lembaga DPRD, tentunya bukan hanya menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan aparatur Negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih merupakan tujuan utama Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

Namun demikian, selain beberapa keberhasilan diatas Sekretariat DPRD Kota Balikpapan juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasilan dalam mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan birokrasi menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Lampiran	v

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.2. Tugas dan Fungsi SKPD	1
1.3 Struktur Organisasi.....	2
1.4. Sumber Daya Pendukung	3
1.5 Aspek Strategis Organisasi.....	4
1.6 Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	4
1.6. Sarana dan prasarana kerja	4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis.....	6
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	14
2.3. Perjanjian Kinerja.....	15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	18
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	18
3.3. Analisis Capaian Kinerja	19
3.4. Realisasi Anggaran.....	22

Bab IV PENUTUP	24
----------------------	----

DAFTAR TABEL

BAB I

Tabel 1.1.....	4
Table 1.2.....	5

BAB II

Tabel 2.1.....	8
Tabel 2.2.....	9
Tabel 2.3.....	10
Tabel 2.4.....	14
Tabel 2.5.....	16
Tabel 2.6.....	16
Tabel 2.7.....	17

BAB III

Tabel 3.1.....	18
Tabel 3.2.....	18
Tabel 3.3.....	19
Tabel 3.4.....	20
Tabel 3.5.....	22
Tabel 3.6.....	22
Tabel 3.7.....	23

Lampiran :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2013-2018;
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan tahun 2013-2018 (Bila ada Perubahan);
3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 dan 2018 secara berjenjang;
4. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2017 (Bila ada perubahan);
5. Indikator Kinerja Individu (IKI);
6. Rencana Aksi atas Pencapaian kinerja Tahun 2017 dan 2018;
7. Rencana Kinerja Tahunan 2017 dan 2018;
8. Piagam Penghargaan Tahun 2017 (bila ada);
9. Laporan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat Prov. tahun sebelumnya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah yang membantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud secara administratif bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD. Sekretariat DPRD Kota Balikpapan merupakan "Tipe B", yang memiliki beban kerja sedang dengan terdiri dari 3 (tiga) bagian untuk mendukung Fungsi DPRD yaitu Bagian Keuangan, Bagian Persidangan, Risalah dan Perundangundangan dan Bagian Umum.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas antara lain : menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, perlengkapan dan rumah tangga DPRD, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

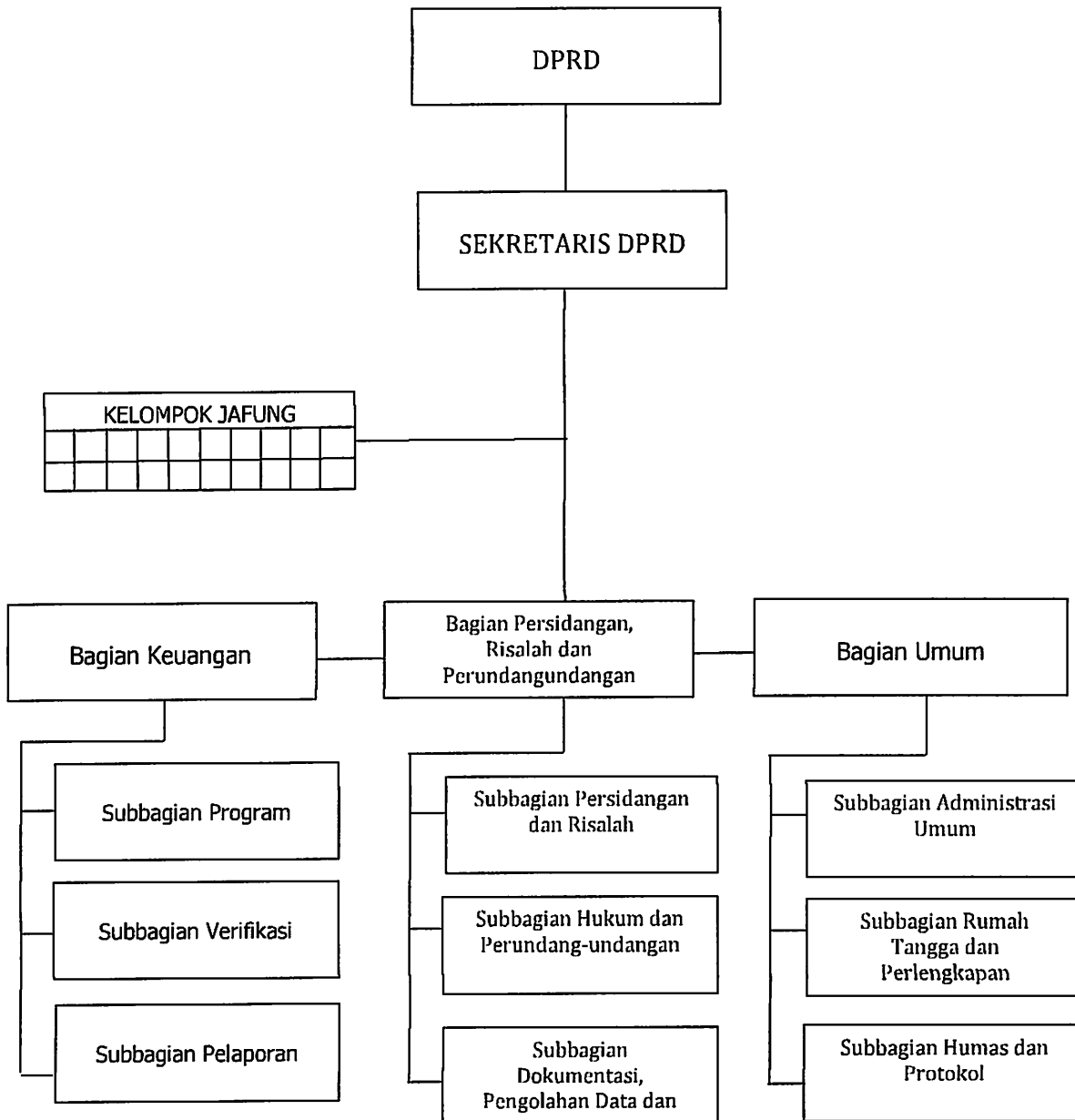
Sedangkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan rumah tangga DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagaimana tabel tentang Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bandung berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi dimaksud, Sekretaris DPRD Kota Balikpapan di bantu oleh 3 (tiga) kepala bagian dan 9 (sembilan) kepala sub bagian, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Keuangan, yang membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Verifikasi; dan
 3. Subbagian Pelaporan.
- c. Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang-undangan, yang membawahkan:
 1. Subbagian Persidangan dan Risalah;
 2. Subbagian Hukum dan Perundang-undangan; dan
 3. Subbagian Dokumentasi, Pengolahan Data dan Perpustakaan.
- d. Bagian Umum, yang membawahkan:
 1. Subbagian Administrasi Umum;
 2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Humas dan Protokol; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4 Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan Struktur Organisasi, Sekretariat DPRD Kota Balikpapan didukung Sumber Daya Aparatur dengan jumlah pegawai sebanyak 67 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 34 orang dan Tenaga Non PNS sebanyak 33 orang. Adapun rincian sumber daya aparatur pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1
Tabel Sumber Daya Aparatur

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Sekretaris	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kabag	3	-	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Kasubbag	3	6	-	9	-	-	-	9	-	-	-	-
PNS	22	12	4	13	15	2	3	14	2	11	3	1
Non PNS	22	11	-	-	-	-	1	7	1	19	3	2
Jlh PNS + Honor	44	23	-	-	-	-	4	21	3	30	6	3
Jumlah	67 rang											

1.5 Aspek Strategis Organisasi

Aspek Strategis Organisasi merupakan pendukung Sekretariat DPRD untuk mencapai visi dan misi. Adapun Visi dan Misi Sekretariat DPRD antara lain :

1. Mendukung dan memfasilitasi 3 (tiga) fungsi utama DPRD, yaitu fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi penyaluran aspirasi masyarakat kepada DPRD;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD.

1.6 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Permasalahan utama yang dihadapi perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi, permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Keterlibatan anggota DPRD dalam tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD;
2. Perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan dalam tatib, dan peraturan antara Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD;
3. Dinamika Sosial dan Politik yang sangat berpengaruh dalam suasana kerja.

1.7 Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dilengkapi berbagai fasilitas sarana dan

prasarana seperti kendaraan roda empat sebanyak 16 unit, kendaraan roda dua sebanyak 12 unit serta inventaris dan perlengkapan kantor lainnya. Adapun Sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kota Balikpapan per 31 Desember 2018 antara lain sebagai berikut :

TABEL 1.2
Tabel Sarana dan Prasarana Kerja

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	3263	m ²
2	Gedung	1632.96	m ²
3	Listrik	1	Jaringan
4	Air	1	Jaringan
5	Telepon	5	Line
6	Area Parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	3	Ruang
8	Ruang Arsip	2	Ruang
9	Koperasi	0	Buah
10	Taman Dalam	0	Area
11	Roda 4	16	Unit
12	Roda 2	12	Unit
13	Roda 6	1	Unit

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 . RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

a. VISI

Visi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan pun memiliki roh yang sama dengan visi Kota Balikpapan tersebut dimana Sekretariat DPRD ingin unggul tentunya dalam kapasitas sebagai SKPD *SUPPORTING* terhadap pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan. Oleh karena itu Visi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

***"Meningkatkan Kualitas Dan Efektifitas Fasilitas Tugas
Dan Fungsi DPRD Kota Balikpapan"***

b. MISI

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya.

Berdasarkan definisi misi dan visi yang ditetapkan tersebut diatas, maka misi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan adalah:

1. Menyelenggarakan pelayanan prima dan memfasilitasi sarana dan prasarana guna peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD

2. Menyelenggarakan pelayanan yang memfasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan
3. Melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan untuk mendukung akuntabilitas kinerja Setwan dan anggota DPRD

Agar terwujud suatu fasilitasi yang berkualitas dan efektif bagi DPRD Kota Balikpapan sehingga penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD pada akhirnya turut memperkuat Visi Pemerintah Kota Balikpapan dalam mewujudkan suatu *Kota Madinatul Iman, Nyaman Dihuni dan Sejahtera* maka dibutuhkan *Grand Design* yang memuat seluruh kegiatan pembahasan dan rapat-rapat yang telah menjadi agenda legislatif dan eksekutif difasilitasi penyelenggaraannya.

Seluruh jadwal kegiatan DPRD juga difasilitasi penyusunannya sehingga lebih tertib dan teratur. Sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan anggota DPRD dalam kerangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan difasilitasi penyediaannya juga administrasi keuangan dan kinerja Sekretariat DPRD dilakukan secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan administrasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan termasuk di dalamnya kinerja diselenggarakan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku.

c. TUJUAN

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program, dan aktifitas pelaksanaan misi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai

dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.1

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kinerja Pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana 2. Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu 3. Persentase fasilitasi keluhan /pengaduan masyarakat 4. Persentase temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti.

Pelayanan Setwan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan	Sekretariat DPRD Kota Balikpapan										
---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.3

Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan	Cakupan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan bahan cetak dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

						dinas beserta kelengkapannya (Dewan) 23. Peningkatan SDM Aparatur Setwan 24. Pengembangan kerja sama dengan media massa
2	Meningkatnya pelayanan aspirasi masyarakat dalam rangka tugas dan fungsi setwan terhadap DPRD	Meningkatnya kualitas Pelayanan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Kepada Dewan	Cakupan layanan pengaduan masyarakat	%	1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1. Kegiatan Reses 2. Rapat Rapat Paripurna 3. Rapat Kerja 4. Penyediaan Tenaga ahli Fraksi DPRD Kota Balikpapan 5. Peningkatan kompetensi badan musyawarah 6. Panitia Khusus/ Panitia Kerja DPRD Kota Balikpapan 7. Peningkatan Kompetensi tugas Pokok dan Fungsi Badan Kehormatan 8. Peningkatan kompetensi tugas pokok dan fungsi badan anggaran 9. Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Kajian-Kajian 10. Peningkatan Kompetensi terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Balikpapan

						<ul style="list-style-type: none"> 11. Kegiatan penyusunan kajian Raperda inisiatif DPRD bidang Politik dan Hukum 12. Kajian Komisi 2 Bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata dan ketahanan pangan 13. Kajian Komisi 3 Bidang infrastruktur dan transportasi 14. Kajian komisi 4 bidang pendidikan dan kesehatan
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Setwan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	Nilai	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Program Perencanaan Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan LKJIP 2. Penyusunan Evaluasi renja & Renstra 3. Penyusunan Renja 4. Penyusunan Renstra

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Table 2.4

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan	Cakupan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan		$\frac{\text{Rapat yang terlaksana}}{\text{Jml Rapat yg terjadwalkan}} \times 100\%$	Laporan realisasi Bag. Umum Sek. DPRD	Set. DPRD
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Kepada Dewan	Cakupan layanan pengaduan masyarakat		$\frac{\text{Jml aspirasi yg ditindaklanjuti kpd Dewan}}{\text{Jml aspirasi yang masuk}} \times 100\%$	Laporan dari bagian Persidangan, Risalah dan Perundang-undangan Set. DPRD	Set. DPRD
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan		Jumlah nilai akumulasi di LHE AKIP	Inspektoran Balikpapan	Set. DPRD

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja aparatur sipil Negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif , tetapi diharapkan dapat mengarah pada manjerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya . Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya , sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan dibuatnya perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, kinerja aparatur
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasai kinerja aparatur
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi Walikota untuk melakukan monitoring, evalasi dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja pimpinan SKPD.
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Table 2.5

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan	Cakupan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	Persentase	100 %
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Kepada Dewan	Cakupan layanan pengaduan masyarakat	Persentase	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	Nilai	B

A. Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 Sekretariat DPRD kota Balikpapan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 63.238.433.461,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2018 menjadi Rp. dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 5.108.943.000,- dan Belanja Langsung Rp 56.071.079.856,-. Adapun realisasi anggaran sebesar 51.393.135.993,- (84%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 4.826.045.274,- (100 %) belanja langsung sebesar Rp 46.567.090.719,- (86.75%).

B. Target Belanja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Tabel 2.6

Target Belanja Sekretariat DPRD Tahun 2018

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	Belanja Tidak Langsung	4.487.916.461	4.826.045.274	100%
2	Belanja Langsung	58.750.517.00	46.567.090.719	86.75%
	Jumlah	63.238.433.461	51.393.135.993	84.00%

C. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2018 Sekretariat DPRD Kota Balikpapan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Presentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan	33.170.411.420	84 %	
2	Meningkatnya kwalitas Pelayanan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Kepada Dewan	13.396.699.239	82.5 %	
3.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	-	-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan telah mengimplementasikan SAKIP sebagai komitmen OPD dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi. Adapun hasil evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Balikpapan memperoleh nilai **42,21** atau predikat **C**.

Adapun hasil evaluasi implementasi AKIP tahun sebelumnya seperti dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2017	Nilai 2018
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	18.74	11.91
2	Pengukuran Kinerja	25%	12.50	9.96
3	Pelaporan Kinerja	15%	6.19	10.07
4	Evaluasi Kinerja	10%	0.00	2.88
5	Capaian Kinerja	20%	1.75	7.67
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	39.18	42.21
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		C	C

2. Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP (Rekomendasi)

Adapun beberapa tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut, antara lain :

1. Membuat Rencana Aksi
2. Membuat Perjanjian Kinerja Esselon secara berjenjang

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Tabel 3.2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV			

3.3 Analisis Capaian Kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya :

No.	Isi Program/Kegiatan	Anggaran 2017	Anggaran 2018	Realisasi		Persentase Realisasi		Persentase Perubahan Perencanaan
				2017	2018	2017	2018	
1	Penyediaan Jasa Surat Mepur	Rp. 3.475.000,00	Rp. 3.775.000,00	Rp. -	Rp. 010.000,00	0,00%	24,11%	24,11%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi untuk daya air 150k	Rp. 546.500,00	Rp. 601.600,00	Rp. 425.295,06	Rp. 450.078,17	78,35%	77,97%	-0,38%
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas (Operasional)	Rp. 48.000,00	Rp. 130.000,00	Rp. -	Rp. 67.551,30	0,00%	51,96%	51,96%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. -	Rp. 210.913,00	Rp. -	Rp. 207.990,40	0,00%	99,03%	99,03%
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 197.775,00	Rp. 197.775,00	Rp. 197.396,98	Rp. 196.218,69	99,79%	99,21%	-1,29%
5	Penyediaan barang Cetak dan Pengabdian	Rp. 418.967,50	Rp. 420.457,60	Rp. 199.015,35	Rp. 349.363,70	47,27%	83,03%	-12,13%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan umum	Rp. 72.178,00	Rp. 87.530,00	Rp. 71.811,85	Rp. 83.520,45	98,10%	95,09%	-4,40%
8	Penyediaan bahan bakar dan perbaikan pemeliharaan	Rp. 334.780,20	Rp. 320.000,00	Rp. 269.879,06	Rp. 302.079,50	80,61%	87,37%	0,21%
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 9.593.500,00	Rp. 9.257.895,00	Rp. 9.437.361,50	Rp. 4.157.200,40	87,30%	56,43%	-30,95%
10	Hak-hak koordinasi konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Rp. 13.183.712,27	Rp. 20.641.931,00	Rp. 12.745.550,54	Rp. 19.090.947,07	86,88%	91,16%	-6,50%
11	Penyediaan jasa administrasi umum perkantoran	Rp. 1.221.520,00	Rp. 580.480,20	Rp. 1.122.571,70	Rp. 580.404,00	52,88%	100,00%	47,12%
12	Penyediaan peralatan rumah jabatan	Rp. 417.480,00	Rp. 214.000,00	Rp. 394.600,00	Rp. 214.594,00	94,57%	100,00%	5,43%
13	Penyediaan peralatan gedung kantor	Rp. 49.000,00	Rp. 479.400,00	Rp. 33.891,50	Rp. 455.539,00	69,17%	95,02%	-4,17%
14	Penyediaan kendaraan operasional	Rp. 229.000,00	Rp. -	Rp. 455.400,00	Rp. -	199,26%	0,00%	-199,26%
15	Pembelian nbn bensin umum jabatan	Rp. 1.224.115,00	Rp. 1.518.366,50	Rp. 1.029.005,36	Rp. 1.256.732,85	84,13%	82,81%	-1,32%
15	Pembelian nbn bensin gedung kantor	Rp. 1.299.020,50	Rp. 1.005.900,00	Rp. 1.224.326,00	Rp. 988.879,75	94,32%	98,24%	3,92%
17	Pembelian nbn bensin kendaraan dinas operasional	Rp. 848.500,00	Rp. 870.000,00	Rp. 849.935,48	Rp. 400.894,25	100,00%	53,32%	-46,68%
18	Pembelian nbn bensin peralatan gedung kantor	Rp. 222.700,00	Rp. 277.200,00	Rp. 219.127,50	Rp. 229.734,50	98,39%	82,87%	-15,52%
19	Pembelian peralatan dinas beserta pengalihan dinas	Rp. 429.340,00	Rp. 879.932,00	Rp. 494.371,00	Rp. 871.950,00	115,38%	100,00%	-15,38%
20	Pembelian nbn bensin pengalihan gedung kantor	Rp. -	Rp. 190.370,00	Rp. -	Rp. 90.078,75	0,00%	47,31%	47,31%
21	Pembelian Bahan Bakar Kendaraan Dinas	Rp. -	Rp. 602.500,00	Rp. -	Rp. 349.164,38	0,00%	57,95%	57,95%
22	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN)	Rp. -	Rp. 312.000,00	Rp. -	Rp. 218.429,50	0,00%	70,00%	70,00%
23	Hak-hak Pensiun	Rp. -	Rp. 70.000,00	Rp. -	Rp. -	0,00%	0,00%	0,00%
24	Kegiatan Riset	Rp. 3.529.000,00	Rp. 2.700.000,00	Rp. 3.418.780,00	Rp. 1.800.000,13	96,88%	66,67%	-30,21%
25	Hutang Pajak	Rp. 151.044,00	Rp. 151.514,00	Rp. 93.409,30	Rp. 140.040,00	61,84%	92,41%	30,57%
26	Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi (Tugas Pokok dan Fungsi) Badan	Rp. 800.530,00	Rp. 882.000,00	Rp. 773.604,30	Rp. 856.712,63	96,64%	97,24%	0,60%
27	Peningkatan Kompetensi Pegawai DPRD Kota Balikpapan	Rp. 302.500,00	Rp. 720.000,00	Rp. 325.863,86	Rp. 427.025,00	107,76%	59,31%	-48,45%
28	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Anggaran	Rp. 1.541.127,01	Rp. 1.492.353,00	Rp. 1.272.192,70	Rp. 1.142.930,02	82,55%	76,58%	-6,97%
29	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD (ADKES)	Rp. 1.517.225,00	Rp. 2.555.450,00	Rp. 1.277.135,40	Rp. 1.188.311,40	84,18%	43,36%	-40,82%
30	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Koordinasi	Rp. 505.000,00	Rp. 1.482.700,00	Rp. 479.185,70	Rp. 554.259,40	94,90%	37,38%	-57,52%
31	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah	Rp. 2.979.564,75	Rp. 1.819.565,00	Rp. 2.683.542,44	Rp. 1.560.096,07	90,05%	85,73%	-4,32%
32	Peningkatan Kompetensi DPRD Kota Balikpapan	Rp. 1.495.000,00	Rp. -	Rp. 1.271.344,00	Rp. -	85,08%	0,00%	-85,08%
33	Pembayaran Data Web: 17 dan mail Balikpapan	Rp. -	Rp. 20.210,00	Rp. -	Rp. 20.185,00	0,00%	99,88%	99,88%
34	Pengadaan Data dan Informasi Kegiatan DPRD Kota Balikpapan	Rp. -	Rp. 30.000,00	Rp. -	Rp. 16.757,00	0,00%	55,86%	55,86%
35	Peningkatan Kompetensi dengan Media Massa	Rp. -	Rp. 3.283.800,00	Rp. -	Rp. 2.827.719,00	0,00%	86,11%	86,11%
36	Ruang Peningkatan kerjasama antara daerah dan pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga	Rp. 754.000,00	Rp. -	Rp. 637.645,20	Rp. -	84,57%	0,00%	-84,57%
37	Ruang Peningkatan dan Peningkatan kerja sistem keuangan kota Balikpapan	Rp. 827.470,00	Rp. -	Rp. 780.329,75	Rp. -	94,31%	0,00%	-94,31%
38	Ruang Sistem Peningkatan Peningkatan Rasio Parkir secara Elektronik	Rp. 827.475,00	Rp. -	Rp. 750.885,40	Rp. -	90,64%	0,00%	-90,64%
39	Ruang Peningkatan dan Peningkatan Lingkungan Hidup	Rp. 811.000,00	Rp. -	Rp. 790.870,15	Rp. -	97,52%	0,00%	-97,52%
40	Ruang Peningkatan Produk Hasil	Rp. 644.567,00	Rp. -	Rp. 593.147,07	Rp. -	91,88%	0,00%	-91,88%
41	Ruang Peningkatan Peningkatan Kerja Aktif, Organisasi Masyarakat, Lembaga Adat dan Tenaga Kerja Aktif	Rp. 760.525,00	Rp. -	Rp. 649.187,80	Rp. -	85,37%	0,00%	-85,37%
42	Ruang Peningkatan dan Peningkatan Penyaji Muzik	Rp. 735.500,00	Rp. -	Rp. 654.777,10	Rp. -	89,03%	0,00%	-89,03%
43	Ruang Peningkatan dan Peningkatan Lingkungan Hidup	Rp. 940.785,00	Rp. -	Rp. 792.870,15	Rp. -	84,28%	0,00%	-84,28%
44	Peningkatan Kapan Raperda melalui DPRD Balikpapan dan Hukam	Rp. -	Rp. 1.114.300,00	Rp. -	Rp. 1.077.135,00	0,00%	96,77%	96,77%
45	Peningkatan Kapan Raperda melalui DPRD Balikpapan Peningkatan Dunia Usaha	Rp. -	Rp. 1.263.930,00	Rp. -	Rp. 1.250.171,40	0,00%	97,79%	97,79%
46	Peningkatan Kapan Raperda melalui DPRD Balikpapan Peningkatan dan Transportasi	Rp. -	Rp. 1.580.595,00	Rp. -	Rp. 1.537.200,50	0,00%	96,94%	96,94%
47	Peningkatan Kapan Raperda melalui DPRD Balikpapan Peningkatan dan Kesehatan	Rp. -	Rp. 1.325.995,00	Rp. -	Rp. 1.258.182,30	0,00%	94,95%	94,95%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi:

Tabel 3.4

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun review hasil evaluasi realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, antara lain :

1. Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi fisik 35% dan realisasi keuangan 24%. Hal tersebut terkait dengan pemanfaatan media elektronik sebagai pendukung kegiatan surat-menyurat di Sekretariat DPRD;
2. Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor realisasi fisik 95% namun realisasi keuangan 48% dikarenakan ada kesalahan penempatan kode rekening pada sewa tenda, kursi dan pengadaan bunga plastik sehingga tidak dapat terealisasi;
3. Pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, kegiatan Rapat- Rapat Paripurna tidak terealisasi karena isi kegiatan tersebut di dalam DPA adalah pengadaan alat tulis kantor, serta cetak dan penggandaan yang sudah terakomodir/ terpenuhi melalui kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
4. Pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, kegiatan Peningkatan Kompetensi terhadap Tugas dan Fungsi DPRD (ADEKSI) realisasi fisik 70% dan realisasi keuangan 44% dikarenakan waktu realisasi yang tidak mencukupi, karena anggaran kegiatan tersebut bertambah pada APBD Perubahan;
5. Pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Pimpinan dan Fraksi realisasi fisik dan realisasi keuangan adalah 0% dikarenakan sampai dengan Triwulan III tidak ada pendaftar yang memenuhi kualifikasi.

Adapun kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain :

1. Memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya sebagai acuan penganggaran tahun berikutnya;
2. Memperhatikan proses penganggaran dengan mencermati penempatan kode rekening, belanja modal dan sebagainya;

3. Mencermati kualifikasi untuk penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan Pimpinan untuk penganggaran berikutnya;
4. Memperhatikan kebutuhan kegiatan dalam proses penganggaran sehingga target realisasi dapat tercapai
5. Diperlukan perhitungan dan perencanaan Rencana Kerja yang lebih tepat dalam setiap kegiatan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program atau kegiatan Sekretariat DPRD yang menunjang keberhasilan antara lain :

Adapun review realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, antara lain :

1. Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran realisasi fisik maupun realisasi keuangan mencapai 100% karena merupakan realisasi honor tenaga bantuan di Sekretariat DPRD dengan sisa anggaran sebesar Rp. 79. 200,- ;
2. Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99.8% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 436.000,- ;
3. Pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (Dewan) realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99.8% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1. 712.000,-
4. Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.032.596,-.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.5

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	4	5	6 (4-5)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan	92,67	85,00	7,67
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penyaluran aspirasi masyarakat kepada Dewan	79,16	68,00	11,16
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	42,21	-	-

3.4 Realisasi Anggaran

Sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja, dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.6
Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan	100%	92,67%	92,67	Rp 39.437.847.000	Rp 33.514.982.920	84,98%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penyaluran aspirasi masyarakat kepada Dewan	100%	79,16%	79,16	Rp 19.132.670.000	Rp 13.052.127.739	68,22%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	B	C	42,21	-	-	-
Jumlah					Rp 58.570.517.000	Rp 46.567.110.659	76,50%
Total Belanja Langsung					Rp 56.071.079.856	Rp 46.567.090.719	83,05%

2. Realisasi anggaran per program dan kegiatan

TABEL
REALISASI PER PROGRAM & KEGIATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KET
		TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 29.781.463,200	Rp 23.507.881,948	85,65%	APBD
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 3.775,000	Rp 910,000	24,11%	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 601.600,000	Rp 469.076,176	77,97%	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Rp 130.000,000	Rp 67.551,300	51,96%	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 210.013,000	Rp 207.980,404	99,03%	
4	Dinas/Operasional				
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 197.775,000	Rp 195.218,892	98,71%	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Rp 420.457,500	Rp 349.363,793	83,09%	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 87.830,000	Rp 83.520,415	95,09%	
8	Penyediaan bahan bacaan dan percetakan perundang-undangan	Rp 350.000,000	Rp 305.629,500	87,32%	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 6.257.898,500	Rp 4.157.280,400	66,43%	
10	Kepd-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Rp 20.941.631,000	Rp 19.890,947,068	91,16%	
11	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Rp 580.483,200	Rp 580.404,000	99,99%	
11	Program Peneliharaan Sarana dan Prasarana	Rp 5.163.450,656	Rp 4.050.029,444	78,44%	
12	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Rp 213.000,000	Rp 212.564,000	99,80%	
13	Pengadaan peralatan gedung Kantor	Rp 479.400,000	Rp 455.339,000	95,02%	
14	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Rp 1.516.380,656	Rp 1.255.732,850	82,81%	
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Rp 1.006.600,000	Rp 908.879,750	90,24%	
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Rp 870.000,000	Rp 463.886,250	53,32%	
17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor	Rp 198.370,000	Rp 95.528,785	48,16%	
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 277.200,000	Rp 228.734,500	82,52%	
19	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas	Rp 602.500,000	Rp 349.164,309	57,95%	
19	Program Peneliharaan Distripin Aparatur	Rp 873.692,000	Rp 871.980,000	99,80%	
20	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan (Dewan)	Rp 873.692,000	Rp 871.980,000	99,80%	
21	Program Peneliharaan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	Rp 312.000,000	Rp 218.429,579	70,01%	
21	Program Peneliharaan Kapasitas Lembaga	Rp 16.605.764,000	Rp 13.052.127,739	78,60%	
22	Kegiatan Leses	Rp 2.700.000,000	Rp 1.930.302,130	71,49%	
23	Kepd-rapat Paripurna	Rp 70.900,000	Rp -	0,00%	
24	Kapal Kerja	Rp 151.534,000	Rp 140.040,000	92,41%	
25	Pemeliharaan Kompetensi Badan Musyawarah Kota	Rp 882.000,000	Rp 866.712,643	98,27%	
25	Panitia Khusus/Panitia Kerja DPRD Kota Balikpapan	Rp 720.000,000	Rp 427.026,590	59,31%	
26	Pemeliharaan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Anggaran	Rp 1.492.353,000	Rp 1.142.890,021	76,58%	
27	Pemeliharaan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan	Rp 698.270,000	Rp 554.266,480	79,38%	
28	Pemeliharaan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketumatan	Rp 1.819.565,000	Rp 1.569.008,072	86,23%	
29	Pemeliharaan Kompetensi Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD (Adiksi)	Rp 2.655.650,000	Rp 1.168.011,400	43,98%	
30	Penyediaan Tenaga Ahli Pimpinan dan Fraksi	Rp 480.000,000	Rp -	0,00%	
31	Politik dan Hukum	Rp 1.114.998,000	Rp 1.077.315,996	96,62%	
32	Penyusunan Kajian Raperda DPRD Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Parwisata	Rp 1.393.898,000	Rp 1.356.171,428	97,29%	
33	DPRD Bidang Infrastruktur & Transportasi	Rp 1.580.598,000	Rp 1.532.280,650	96,94%	
34	Penyusunan Kajian Raperda DPRD Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Rp 1.325.998,000	Rp 1.288.182,329	97,15%	
34	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp 3.334.710,000	Rp 2.866.661,950	85,96%	
35	Pembaharuan Data Website dan mail Balikpapan.gold	Rp 20.910,000	Rp 20.185,000	96,53%	
36	Pengelolaan Data dan Informasi Kegiatan DPRD Kota Balikpapan	Rp 30.000,000	Rp 18.757,000	62,52%	
37	Pengembangan Kerjasama dengan Media Massa	Rp 3.283.800,000	Rp 2.827.719,950	86,11%	
	JUMLAH	Rp 56.071.079,856	Rp 46.567.110,660	83,05%	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2018 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi baik. Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 63.238.433.461,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 51.393.135.993,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 84%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Sekretariat DPRD Kota Balikpapan kondisi anggaran adalah silpa Rp. 11.845.297.468,-.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan 2016-2021 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pada tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam

meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Balikpapan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Balikpapan.

Balikpapan, 26 Februari 2019
Sekretaris DPRD Kota Balikpapan

ABDUL AZIS.AM

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. Makmur	Kabag Umum	
2	Drs. Asgem,MAP	Kabag Persidangan, Risalah dan PerUU	
3	Rachman Basri,SE,MSi	Kabag Keuangan	
4	Alissa Maresh,S.Ip	Ksb Program dan Perencanaan	

**DAFTAR
LAMPIRAN**

Indikator Kinerja Utama (IKU)



SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 86 Telp. (0542) 421008 – 731218
BALIKPAPAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 170/03.07.3/Setwan

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 - 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 yang termuat dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunannya pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap Renstra Sekretaris DPRD Kota Balikpapan tahun 2016-2021 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Balikpapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);
 9. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 50);

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-14/2017 tanggal 27 Januari 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Balikpapan;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah sebagaimana lampiran surat Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 27 Februari 2017

Pt.SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN,



SUKARYANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Balikpapan
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kota Balikpapan
3. Kepala Bagian Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD
Kota Balikpapan

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Indikator Kinerja Utama

Rencana Strategis

Sekretariat DPRD Kota

Balikpapan

Tahun 2016 - 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 - 2021

- 1 Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Balikpapan
- 2 Tugas : Membantu Wali Kota dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan lembaga lainnya serta pelayanan administratif
- 3 Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan rumah tangga DPRD
 - b. Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD
 - c. Penyelenggaraan Rapat DPRD
 - d. Penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan dalam mendukung Tugas dan fungsi DPRD
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan/Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan	1 Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	Laporan Realisasi Bag. Umum Sekret. DPRD Kota Balikpapan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Penyaluran Aspirasi Masyarakat kepada Dewan	2 Persentase Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat	Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	Laporan dari Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang undangan Sekret. DPRD Kota Balikpapan

3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	Hasil evaluasi LKjIP dari Inspektorat Kota Balikpapan
---	---	---	--	----------------------------------	---

**Pt. SEKRETARIS DPRD
KOTA BALIKPAPAN,**



SUKARYANTO

Perjanjian Kinerja (PK)
Tahun 2018 secara
berjenjang



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan dalam rangka mewujudkan Tema Kerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PURNOMO M, S.Sos, M.M**
Jabatan : **SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. M. RIZAL EFFENDI, S.E**
Jabatan : **WALI KOTA BALIKPAPAN**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2018 yang merupakan tahapan pencapaian target kinerja yang tertuang didalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja khusus yang merupakan pendukung pencapaian Tema Kerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018 yaitu Tahun Integritas.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja sesuai dokumen perencanaan dan target kinerja khusus menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pencapaian target kinerja dan target kinerja khusus yang diperjanjikan sesuai lampiran ini merupakan indikator penilaian dan bahan evaluasi kinerja pihak pertama oleh pihak kedua.

Pihak kedua dapat melakukan evaluasi dalam rangka penempatan dalam jabatan berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh pihak kedua.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

H. M. RIZAL EFFENDI, S.E

Balikpapan, 15 Januari 2018

Pihak Pertama

PURNOMO M, S.Sos, M.M



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218
BALIKPAPAN
KodePos 76112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKTRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	100 %
		2. Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	80 %
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	B

	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	32.330.357.000,00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	3.472.570.000,00	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp	19.132.670.000,00	APBD
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	855.210.000,00	APBD
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	RP	312.000.000,00	APBD
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp	2.647.710.000,00	APBD
	Jumlah	RP	58.750.517.000,00	

Balikpapan, Januari 2018

Walikota Balikpapan

H.M RIZAL EFFENDI, SE

Sekretaris DPRD Kota Balikpapan

PURNOMO. M

PERJANJIAN KINERJA KHUSUS
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN
TAHUN : 2018

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET SEMESTER I	TARGET SEMESTER II	KETERANGAN
1	Tertib Penggunaan dan Administrasi Daftar Hadir Elektronik	a. Penggunaan Daftar Hadir elektronik b. Tertib Administrasi Pengendalian Daftar Hadir	99% hari kerja Pegawai terlambat, pulang cepat, izin, cuti seluruhnya teradministrasi dengan baik / Tersedia buku kendali	99% hari kerja Pegawai terlambat, pulang cepat, izin, cuti seluruhnya teradministrasi dengan baik / Tersedia buku kendali	
2	Pencegahan Korupsi	Persentase Penandatanganan Pakta Integritas	100% (seluruh PNS yang menduduki Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator telah melakukan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas)	100% (seluruh PNS yang menduduki Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator tidak melakukan Pelanggaran Pakta Integritas)	
3	Penguatan Akuntabilitas	Persentase penandatanganan Perjanjian Kinerja Individu yang terkait dengan Kinerja Perangkat Daerah	100% (seluruh PNS yang menduduki Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator telah melakukan penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Individu)	100% (seluruh PNS yang menduduki Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator telah dilakukan Pengukuran Kinerja Individu secara periodik)	

Balikpapan, Januari 2018

WALI KOTA BALIKPAPAN

H. M. RIZAL EFFENDI, SE

SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN

PURNOMO, M, S.Sos, M.M

Menyaksikan,

WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN

H. RAHMAD MAS'UD, SE

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Drs. SAYID MN FADLI, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Drs. MAKMUR
JABATAN : KEPALA BAGIAN UMUM

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

NAMA : PURNOMO.M
JABATAN : SEKRETARIS DPRD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka waktu menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

PURNOMO.M

PIHAK PERTAMA,

Drs. MAKMUR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bagian Umum.	1. Penyusunan program dan kegiatan Bagian Umum	1 dokumen
		2. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan klarifikasi penyampaian informasi serta publikasi kegiatan DPRD	1 kegiatan
		3. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan	1 kegiatan
		4. Pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan	1 kegiatan
		5. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian	1 kegiatan
		6. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan	1 kegiatan
		7. Pengelolaan pengaduan masyarakat	1 kegiatan
		8. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pembantu	1 dokumen
		9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi	3 dokumen

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 32.330.357.000	APBD
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 3.472.570.000	APBD
3. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 2.596.800.000	APBD
4. Peningkatan disiplin aparatur	Rp. 855.210.000	APBD
5. Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur	Rp. 312.000.000	APBD
	+ Rp. 39.566.937.000	

Balikpapan, Januari 2018

Pihak Kedua
Sekretaris DPRD Kota Balikpapan

Pihak Pertama
Kepala Bagian Umum
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

PURNOMO.M

Drs. MAKMUR

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Bagian Umum
 2. Tugas :

1. penyusunan program dan kegiatan Bagian Umum;
2. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan klarifikasi penyampaian informasi serta publikasi kegiatan DPRD;
3. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
4. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan;
5. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
6. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
7. pengelolaan pengaduan masyarakat;
8. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pembantu;
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
10. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		4
1.	Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bagian Umum.	1. Penyusunan program dan kegiatan Bagian Umum	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	Dokumen renja Setwan
		2. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan klarifikasi penyampaian informasi serta publikasi kegiatan DPRD	Jumlah kegiatan koordinasi, konsultasi dan penyampaian informasi serta publikasi kegiatan DPRD	Kegiatan DPRD Kota Balikpapan
		3. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan	Jumlah dokumen ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan Kota Balikpapan Tahun 2018	Dokumen Barang dan Aset Setwan
		4. Pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan	Jumlah kegiatan kehumasan dan keprotokolan	Kegiatan kehumasan dan keprotokolan DPRD Kota Balikpapan
		5. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian	Jumlah dokumen DUK Kepegawaian	Dokumen DUK Setwan

		6. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan	Jumlah dokumen hasil evaluasi renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	Dokumen evaluasi renja Setwan
		7. Pengelolaan pengaduan masyarakat	Jumlah dokumen aduan masyarakat	Dokumen aduan masyarakat
		8. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pembantu	Jumlah dokumen pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi pembantu	Dokumen PPID
		9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi	Jumlah dokumen hasil monitoring kegiatan	Dokumen Evaluasi Renja dan Kartu Kendali Kegiatan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : BERLINA PUSPAYANTI,S.SOS
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

NAMA : DRS.MAKMUR
JABATAN : KEPALA BAGIAN UMUM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka waktu menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

DRS.MAKMUR

BERLINA PUSPAYANTI,S.SOS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan	1. menyusun program dan kegiatan subbagian administrasi umum;	1 kegiatan
		2. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;	1 kegiatan
		3. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;	1 kegiatan
		4. melaksanakan urusan naskah dinas/surat menyurat yang diperlukan oleh DPRD dan Sekretariat DPRD;	1 kegiatan
		5. melaksanakan pelayanan administrasi umum untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;	1 kegiatan
		6. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;	1 kegiatan
		7. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;	1 kegiatan
		8. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;	1 kegiatan
		9. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;	1 kegiatan

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penyediaan jasa		
Administrasi kantor	Rp. 580.008.000	APBD
2. Peningkatan sumber	Rp. 312.000.000	APBD
Daya manusia aparatur		
setwan		+
	Rp. 892.008.000	APBD

Pihak Kedua
Kepala Bagian Umum
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Balikpapan, Januari 2018
Pihak Pertama
Kasubbag Administrasi Umum
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Drs. MAKMUR

BERLINA PUSPAYANTI, S.Sos



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ERRIANSYAH HARYONO,S.STP
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

NAMA : DRS.MAKMUR
JABATAN : KEPALA BAGIAN UMUM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka waktu menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

DRS.MAKMUR

ERRIANSYAH HARYONO,S.STP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan	1. menyusun program dan kegiatan subbagian rumah tangga dan perlengkapan;	1 kegiatan
		2. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;	1 kegiatan
		3. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;	1 kegiatan
		4. melaksanakan urusan rumah tangga di rumah jabatan Pimpinan DPRD;	1 kegiatan
		5. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;	1 kegiatan
		6. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;	1 kegiatan
		7. menyiapkan ruangan, peralatan dan jamuan rapat/sidang DPRD;	1 kegiatan
		8. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas	1 kegiatan

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 3.775.000	APBD
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 601.600.000	APBD
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp. 51.172.500	APBD
4. Penyediaan jasa Kebersihan kantor	Rp. 210.013.000	APBD
5. Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 197.775.000	APBD
6. Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	Rp. 420.457.000	APBD

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp. 87.830.000	APBD
8. Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 11.836.726.000	APBD
9. Pengadaan peralatan Rumah jabatan/dinas	Rp. 13.000.000	APBD
10. Pengadaan peralatan Gedung kantor	Rp. 267.400.000	APBD
11. Pemeliharaan rutin/ Berkala rumah jabatan	Rp. 1.058.000.000	APBD
12. Pemeliharaan rutin/ Berkala gedung kantor	Rp. 306.600.000	APBD
13. Pemeliharaan rutin/ Berkala kendaraan Dinas/operasional	Rp. 870.000.000	APBD
14. Pemeliharaan rutin/ Berkala perlengkapan Gedung kantor	Rp. 77.870.000	APBD
15. Pemeliharaan rutin/ Berkala peralatan Gedung kantor	Rp. 277.200.000	APBD
16. Penyediaan bahan Bakar kendaraan dinas	Rp. 602.500.000	APBD
17. Pengadaan pakaian dinas Beserta kelengkapannya (DEWAN)	Rp. 855.210.000	APBD
	+	
	Rp. 5.912.239.226	

Pihak Kedua
Kepala Bagian Umum
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Balikpapan, Januari 2018
Pihak Pertama
Kasubbag Rumah Tangga & Perlengkapan
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Drs. MAKMUR

ERRIANSYAH HARYONO,S.STP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : UMAR ADI,SE

JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

NAMA : DRS.MAKMUR

JABATAN : KEPALA BAGIAN UMUM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka waktu menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

DRS.MAKMUR

UMAR ADI,SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan	1. menyusun program dan kegiatan subbagian humas dan protokol;	1 kegiatan
		2. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;	1 kegiatan
		3. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;	1 kegiatan
		4. menyusun jadwal acara/kegiatan unsur Pimpinan DPRD;	1 kegiatan
		5. melaksanakan pengaturan acara dan akomodasi tamu-tamu yang melakukan kunjungan kerja ke DPRD;	1 kegiatan
		6. menyelenggarakan konferensi pers kegiatan DPRD untuk konsumsi Pers;	1 kegiatan
		7. melaksanakan pemberian informasi dan publikasi kegiatan DPRD;	1 kegiatan
		8. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;	1 kegiatan

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Rapat rapat koordinasi, Konsultasi ke dalam Dan keluar daerah	Rp.17.991.000.000	APBD
2. Pengembangan kerja Sama media masa	Rp. 2.596.800.000	APBD
	+ ----- Rp. 20.587.800.000	

Pihak Kedua
Kepala Bagian Umum
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Balikpapan, Januari 2018
Pihak Pertama
Kasubbag Humas & Protokol
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Drs. MAKMUR

UMAR ADI,SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : RACHMAN BASRI, SH, MH
JABATAN : KEPALA BAGIAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

NAMA : PURNOMO.M
JABATAN : SEKRETARIS DPRD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka waktu menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

PURNOMO.M

RACHMAN BASRI,SH,MH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Penyusunan program dan kegiatan Bagian Keuangan	1. Jumlah dokumen rencana kerja tahunan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	1 dokumen
2.	Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2. Jumlah dokumen LKJIP Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2018	1 dokumen
3.	Pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan rencana kerja anggaran, kebutuhan anggaran keuangan, verifikasi keuangan dan pembinaan perbendaharaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi	3. Jumlah dokumen RKA dan DPA Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2018	2 dokumen
		4. Jumlah dokumen laporan tutup buku bendahara	12 dokumen
		5. Jumlah dokumen hasil monitoring dan kartu kendali kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	42 dokumen
		6. Jumlah dokumen hasil evaluasi renja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	4 dokumen

Pihak Kedua
Sekretaris DPRD Kota Balikpapan

Balikpapan, Januari 2018
Pihak Pertama
Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

PURNOMO.M

RACHMAN BASRI, SH, MH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : DRA. SUMBODO SRI WAHYUNI
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PELAPORAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

NAMA : RACHMAN BASRI,SH.MH
JABATAN : KEPALA BAGIAN KEUANGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka waktu menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

RACHMAN BASRI,SH.MH

DRA. SUMBODO SRI WAHYUNI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB BAGIAN PELAPORAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	1. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;	1 kegiatan
		2. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;	4 laporan
		3. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;	1 kegiatan
		4. Melaksanakan evaluasi terhadap realisasi pengeluaran anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;	4 laporan
		5. Menyusun laporan keuangan;	2 laporan
		6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;	1 kegiatan

Pihak Kedua
Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Balikpapan, Januari 2018
Pihak Pertama
Kasubbag Pelaporan
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

RACHMAN BASRI, SH, MH

Dra. SUMBODO SRI WAHYUNI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ALISSA MARESH, S.IP
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN PERENCANAAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

NAMA : RACHMAN BASRI, SH.MH
JABATAN : KEPALA BAGIAN KEUANGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka waktu menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

RACHMAN BASRI, SH.MH

ALISSA MARESH,S.IP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM ANGGARAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	1. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah	5 laporan
		2. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan	1 dokumen
		3. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan	1 kegiatan
		4. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 laporan
		5. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bagian;	1 kegiatan
		6. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran	1 kegiatan
		7. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran	1 dokumen
		8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas	1 kegiatan

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Peningkatan kompetensi tugas pokok dan fungsi badan anggaran	Rp. 1.957.353.000	APBD
	+	

	Rp. 1.957.353.000	

Pihak Kedua
Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Balikpapan, September 2018
Pihak Pertama
Kasubbag Program
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

RACHMAN BASRI, SH, MH

ALISSA MARESH, S. IP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : HASNAH,S.SOS

JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN VERIFIKASI

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

NAMA : RACHMAN BASRI,SH.MH

JABATAN : KEPALA BAGIAN KEUANGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka waktu menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

RACHMAN BASRI,SH.MH

HASNAH,S.SOS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB BAGIAN VERIFIKASI
SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	1. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;	1 kegiatan
		2. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan kepada bendahara;	1 kegiatan
		3. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas	1 kegiatan

Pihak Kedua
Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Balikpapan, Januari 2018
Pihak Pertama
Kasubbag Verifikasi
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

RACHMAN BASRI, SH, MH

HASNAH, S. Sos



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **Drs. ASGEM,MAP**
JABATAN : **KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN, RISALAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

NAMA : **PURNOMO.M**
JABATAN : **SEKRETARIS DPRD**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka waktu menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

PURNOMO.M

PIHAK PERTAMA,

Drs. ASGEM,MAP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bagian Persidangan.	1. Penyusunan program dan kegiatan Bagian Persidangan	1 dokumen
		2. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi alat kelengkapan dewan	4 kegiatan
		3. Pelaksanaan dan pembinaan penyusunan Raperda	1 kegiatan
		4. Pengordinasian dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan rapat/sidang DPRD dan alat kelengkapan DPRD	1 kegiatan
		5. Monitoring pelaksanaan kegiatan Reses Dewan	3 kegiatan

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp. 19.132.670.000	APBD
2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 50.910.000	APBD
	+	
	Rp. 19.183.580.000	

Balikpapan, Januari 2018

Pihak Kedua
 Sekretaris DPRD Kota Balikpapan

Pihak Pertama
 Kepala Bagian Persidangan
 Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

ABDUL AZIS, AM

Drs. ASGEM, M.AP

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang-undangan

2. Tugas :
1. Penyusunan program dan kegiatan Bagian Persidangan;
 2. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi alat kelengkapan dewan;
 3. Pelaksanaan dan pembinaan penyusunan Raperda;
 4. Pengordinasian dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan rapat/sidang DPRD dan alat kelengkapan DPRD;
 5. Monitoring pelaksanaan kegiatan Reses Dewan;
 6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		4
1.	Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bagian Persidangan.	1. Penyusunan program dan kegiatan Bagian Persidangan	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	Dokumen renja Setwan
		2. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi alat kelengkapan dewan	Jumlah kegiatan koordinasi, konsultasi alat kelengkapan dewan	Kegiatan AKD DPRD Kota Balikpapan
		3. Pelaksanaan dan pembinaan penyusunan Raperda	Jumlah dokumen Raperda DPRD Kota Balikpapan Tahun 2018	Dokumen Raperda
		4. Pengordinasian dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan rapat/sidang DPRD dan alat kelengkapan DPRD	Jumlah kegiatan Rapat-rapat dan sidang anggota DPRD	Kegiatan Rapat dan Sidang Anggota DPRD
		5. Monitoring pelaksanaan kegiatan Reses Dewan	Jumlah kegiatan Reses	Dokumen Reses Masa persidangan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : HARI KUNTORO,S.IP,M.SI
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

NAMA : DRS.ASGEM,M.AP
JABATAN : KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN, RISALAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka waktu menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

DRS.ASGEM,MAP

PIHAK PERTAMA,

HARI KUNTORO,S.IP,M.SI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : PURNAMA ENDANG MURWATI,SE
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI, PENGOLAHAN DATA DAN PERPUSTAKAAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

NAMA : DRS.ASGEM,M.AP
JABATAN : KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN, RISALAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka waktu menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

DRS.ASGEM,MAP

PURNAMA ENDANG MURWATI,SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI, PENGOLAHAN DATA DAN
PERPUSTAKAAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Kepada Dewan	1. menyusun program dan kegiatan subbagian dokumentasi, pengolahan data dan perpustakaan;	1 kegiatan
		2. meliput, mengumpulkan dan mendokumentasikan kegiatan DPRD;	1 kegiatan
		3. mengelola dan menata dokumen hasil rapat/sidang DPRD;	1 kegiatan
		4. melaksanakan fasilitasi kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;	3 kegiatan
		5. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain bidang pengelolaan data, informasi dan perpustakaan;	1 kegiatan
		6. mengelola perpustakaan dan pengadaan bahan perpustakaan/referensi yang dibutuhkan DPRD;	1 kegiatan

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penyediaan bahan bacaan Dan peraturan perundang-undangan	Rp. 350.000.000	APBD
2. Reses	Rp. 2.700.000.000	APBD
3. Peningkatan kompetensi Terhadap tugas dan fungsi DPRD	Rp. 1.767.225.000	APBD
4. Pembaharuan Data Website Dan mail	Rp. 20.910.000	APBD
5. Pengelolaan data dan informasi Kegiatan DPRD	Rp. 30.000.000	+ APBD
	Rp. 4.868.135.000	

Pihak Kedua
Kepala Bagian Persidangan,
Risalah dan Perundangundangan
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Balikpapan, Januari 2018
Pihak Pertama
Kasubbag Dokumentasi, Pengolahan
Data dan Perpustakaan
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : EDDY SUSILO,SH

JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

NAMA : DRS.ASGEM,M.AP

JABATAN : KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN, RISALAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka waktu menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

DRS.ASGEM,MAP

PIHAK PERTAMA,

EDDY SUSILO,SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Kepada Dewan	1. menyusun program dan kegiatan subbagian hukum dan perundang-undangan;	1 kegiatan
		2. melaksanakan pengkajian/penelitian produk hukum;	1 kegiatan
		3. menyiapkan bahan penyusunan/perumusan rancangan produk hukum DPRD;	1 kegiatan
		4. mendistribusikan Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah atau atas inisiatif DPRD kepada Anggota DPRD untuk dikaji;	1 kegiatan
		5. menghimpun dan mengamankan arsip/dokumen hasil rapat/sidang DPRD;	1 kegiatan
		6. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan	1 kegiatan

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Panitia Khusus/ Panitia Kerja DPRD Kota Balikpapan	Rp. 784.632.000	APBD
2. Peningkatan Kompetensi tugas Pokok dan Fungsi Badan Kehormatan	Rp. 558.270.000	APBD
3. Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Kajian-Kajian	Rp. 2.419.264.000	APBD
4. Penyediaan Tenaga ahli Fraksi DPRD Kota Balikpapan	Rp. 480.000.000	APBD
5. Penyusunan kajian Raperda inisiatif DPRD bidang Politik dan Hukum	Rp 1.647.998.000	APBD
6. Penyusunan kajian Raperda inisiatif DPRD bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata dan ketahanan pangan	Rp. 1.741.898.000	APBD

7. Penyusunan kajian Raperda inisiatif DPRD bidang Infrastruktur dan transportasi	Rp. 2.023.598.000	APBD
8. Penyusunan kajian Raperda inisiatif DPRD bidang Pendidikan dan Kesehatan	Rp. 1.647.998.000	APBD
	Rp. 11.303.658.000	+

Pihak Kedua
Kepala Bagian Persidangan,
Risalah dan Perundangundangan
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Balikpapan, Januari 2018
Pihak Pertama
Kasubbag Hukum & Perundang-Undangan
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Drs. ASGEM, M. AP

EDDY SUSILO,SH

Perjanjian Kinerja (PK)
PERUBAHAN Tahun 2018



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218
BALIKPAPAN
KodePos 76112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan	Cakupan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	100 %
2	Meningkatnya kwalitas Pelayanan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Kepada Dewan	Cakupan layanan pengaduan masyarakat	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	B

	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	32.330.357.000,00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	3.472.570.000,00	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp	19.132.670.000,00	APBD
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	855.210.000,00	APBD
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	RP	312.000.000,00	APBD
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp	2.647.710.000,00	APBD
	Jumlah	RP	58.750.517.000,00	

Balikpapan, Januari 2018

Walikota Balikpapan

Sekretaris DPRD Kota Balikpapan

H.M RIZAL EFFENDI, SE

PURNOMO. M

**PERJANJIAN KINERJA KHUSUS
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

SATUAN PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD
TAHUN : 2018

No	Program	Indikator	Target Semester I	Target semester II
1	2	3	4	5
1	Tertib Penggunaan dan Administrasi Daftar Hadir Elektronik	a. Penggunaan Daftar Hadir elektronik minimal 99%	99% hari kerja	99% hari kerja
		b. Tertib Administrasi Pengendalian Daftar Hadir	Pegawai terlambat, pulang cepat, izin, cuti seluruhnya teradministrasi dengan baik / Tersedia buku kendali	Pegawai terlambat, pulang cepat, izin, cuti seluruhnya teradministrasi dengan baik / Tersedia buku kendali
2	Serapan Anggaran	Persentase Pencapaian Target Kegiatan Fisik dan Keuangan		Minimal capaian realisasi fisik dan keuangan 80% dari target

WALIKOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, Januari 2017
SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN

H.M RIZAL EFFENDI, SE

PURNOMO. M

Menyaksikan,

Wakil WALIKOTA BALIKPAPAN

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

H. RAHMAD MAS'UD, SE

SAYID MN FADLI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : EDDY SUSILO,SH
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

NAMA : DRS.MAKMUR
JABATAN : KEPALA BAGIAN UMUM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka waktu menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

DRS.MAKMUR

PIHAK PERTAMA,

EDDY SUSILO,SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan	1. menyusun program dan kegiatan subbagian humas dan protokol;	1 kegiatan
		2. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;	1 kegiatan
		3. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;	1 kegiatan
		4. menyusun jadwal acara/kegiatan unsur Pimpinan DPRD;	1 kegiatan
		5. melaksanakan pengaturan acara dan akomodasi tamu-tamu yang melakukan kunjungan kerja ke DPRD;	1 kegiatan
		6. menyelenggarakan konferensi pers kegiatan DPRD untuk konsumsi Pers;	1 kegiatan
		7. melaksanakan pemberian informasi dan publikasi kegiatan DPRD;	1 kegiatan
		8. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;	1 kegiatan

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Rapat rapat koordinasi, Konsultasi ke dalam Dan keluar daerah	Rp.17.991.000.000	APBD
2. Pengembangan kerja Sama media masa	Rp. 2.596.800.000	APBD
	+ ----- Rp. 20.587.800.000	

Pihak Kedua
Kepala Bagian Umum
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Balikpapan, Agustus 2018
Pihak Pertama
Kasubbag Humas & Protokol
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Drs. MAKMUR

EDDY SUSILO, SH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SULIANSYAH,SE
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

NAMA : DRS.MAKMUR
JABATAN : KEPALA BAGIAN UMUM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka waktu menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

DRS.MAKMUR

SULIANSYAH,SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan	1. menyusun program dan kegiatan subbagian rumah tangga dan perlengkapan;	1 kegiatan
		2. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;	1 kegiatan
		3. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;	1 kegiatan
		4. melaksanakan urusan rumah tangga di rumah jabatan Pimpinan DPRD;	1 kegiatan
		5. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;	1 kegiatan
		6. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;	1 kegiatan
		7. menyiapkan ruangan, peralatan dan jamuan rapat/sidang DPRD;	1 kegiatan
		8. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas	1 kegiatan

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 3.775.000	APBD
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 601.600.000	APBD
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp. 51.172.500	APBD
4. Penyediaan jasa Kebersihan kantor	Rp. 210.013.000	APBD
5. Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 197.775.000	APBD
6. Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	Rp. 420.457.000	APBD
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp. 87.830.000	APBD

8. Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 11.836.726.000	APBD
9. Pengadaan peralatan Rumah jabatan/dinas	Rp. 13.000.000	APBD
10. Pengadaan peralatan Gedung kantor	Rp. 267.400.000	APBD
11. Pemeliharaan rutin/ Berkala rumah jabatan	Rp. 1.058.000.000	APBD
12. Pemeliharaan rutin/ Berkala gedung kantor	Rp. 306.600.000	APBD
13. Pemeliharaan rutin/ Berkala kendaraan Dinas/operasional	Rp. 870.000.000	APBD
14. Pemeliharaan rutin/ Berkala perlengkapan Gedung kantor	Rp. 77.870.000	APBD
15. Pemeliharaan rutin/ Berkala peralatan Gedung kantor	Rp. 277.200.000	APBD
16. Penyediaan bahan Bakar kendaraan dinas	Rp. 602.500.000	APBD
17. Pengadaan pakaian dinas Beserta kelengkapannya (DEWAN)	Rp. 855.210.000	APBD
		+
	Rp. 5.912.239.226	

Pihak Kedua
Kepala Bagian Umum
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Balikpapan, September 2018
Pihak Pertama
Kasubbag Rumah Tangga & Perlengkapan
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Drs. MAKMUR

SULIANSYAH, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ADE PRAYUDHA,SH
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

NAMA : DRS.ASGEM,M.AP
JABATAN : KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN, RISALAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka waktu menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

DRS.ASGEM,MAP

PIHAK PERTAMA,

ADE PRAYUDHA, SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Kepada Dewan	1. menyusun program dan kegiatan subbagian hukum dan perundang-undangan;	1 kegiatan
		2. melaksanakan pengkajian/penelitian produk hukum;	1 kegiatan
		3. menyiapkan bahan penyusunan/perumusan rancangan produk hukum DPRD;	1 kegiatan
		4. mendistribusikan Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah atau atas inisiatif DPRD kepada Anggota DPRD untuk dikaji;	1 kegiatan
		5. menghimpun dan mengamankan arsip/dokumen hasil rapat/sidang DPRD;	1 kegiatan
		6. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;	1 kegiatan

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Panitia Khusus/ Panitia Kerja DPRD Kota Balikpapan	Rp. 784.632.000	APBD
2. Peningkatan Kompetensi tugas Pokok dan Fungsi Badan Kehormatan	Rp. 558.270.000	APBD
3. Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Kajian-Kajian	Rp. 2.419.264.000	APBD
4. Penyediaan Tenaga ahli Fraksi DPRD Kota Balikpapan	Rp. 480.000.000	APBD
5. Penyusunan kajian Raperda inisiatif DPRD bidang Politik dan Hukum	Rp 1.647.998.000	APBD
6. Penyusunan kajian Raperda inisiatif DPRD bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata dan ketahanan pangan	Rp. 1.741.898.000	APBD

7. Penyusunan kajian Raperda inisiatif DPRD bidang Infrastruktur dan transportasi	Rp. 2.023.598.000	APBD
8. Penyusunan kajian Raperda inisiatif DPRD bidang Pendidikan dan Kesehatan	Rp. 1.647.998.000	APBD
	Rp. 11.303.658.000	+

Pihak Kedua
Kepala Bagian Persidangan,
Risalah dan Perundangundangan
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Drs. ASGEM, M. AP

Balikpapan, September 2018
Pihak Pertama
Kasubbag Hukum & Perundang-Undangan
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

ADE PRAYUDHA, SH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **DIAN WASESA, S.STP**
JABATAN : **KEPALA SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH**

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

NAMA : **DRS.ASGEM,M.AP**
JABATAN : **KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN, RISALAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka waktu menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

DRS.ASGEM,MAP

PIHAK PERTAMA,

DIAN WASESA, S. STP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Kepada Dewan	1. menyusun program dan kegiatan subbagian persidangan dan risalah;	1 kegiatan
		2. penyiapan bahan pembentukan alat kelengkapan DPRD;	4 dokumen
		3. pengoordinasian pelaksanaan sidang/rapat pimpinan dan alat kelengkapan DPRD, peninjauan Dewan serta pertemuan dengan masyarakat;	1 kegiatan
		4. pelaksanaan penyusunan risalah hasil rapat dan persidangan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD;	1 kegiatan
		5. menyelenggarakan urusan administrasi rapat	1 kegiatan
		6. menyiapkan bahan rapat dan persidangan;	1 kegiatan
		7. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas	1 kegiatan

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Rapat Paripurna	Rp. 70.900.000	APBD
2. Peningkatan Kompetensi Badan Musyawarah	Rp. 1.182.000.000 +	APBD
	<u>Rp. 1.252.900.000</u>	

Pihak Kedua
Kepala Bagian Persidangan,
Risalah dan Perundangundangan
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Balikpapan, September 2018
Pihak Pertama
Kasubbag Persidangan & Risalah
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Drs. ASGEM, M. AP

DIAN WASESA, S. STP

Indikator Kinerja Individu (IKI)

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- 1 JABATAN : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2 TUGAS : menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, perlengkapan dan rumah tangga DPRD, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 3 FUNGSI : 1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan rumah tangga DPRD;
 2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 3. penyelenggaraan rapat DPRD;
 4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
 5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Laporan Realisasi Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Balikpapan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Penyaluran Aspirasi Masyarakat kepada Dewan	Persentase Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat	Persentase Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat	Laporan dari Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang undangan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	Predikat hasil penilaian terhadap laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil evaluasi LKJIP dari Inspektorat Kota Balikpapan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- 1 JABATAN : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2 TUGAS : menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, perlengkapan dan rumah tangga DPRD, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 3 FUNGSI : 1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan rumah tangga DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. penyelenggaraan rapat DPRD;
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Laporan Realisasi Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Balikpapan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Penyaluran Aspirasi Masyarakat kepada Dewan	Persentase Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat	Persentase Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat	Laporan dari Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang undangan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	Predikat hasil penilaian terhadap laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil evaluasi LKjIP dari Inspektorat Kota Balikpapan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- 1 JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI, PENGOLAHAN DATA DAN PERPUSTAKAAN
- 2 TUGAS : 1. menyusun program dan kegiatan subbagian dokumentasi, pengolahan data dan perpustakaan;
 2. meliput, mengumpulkan dan mendokumentasikan kegiatan DPRD;
 3. mengelola jurnal dan dokumentasi kegiatan Anggota DPRD berdasarkan kalender kegiatan Anggota DPRD;
 4. mengelola dan menata dokumen hasil rapat/sidang DPRD;
 5. melaksanakan fasilitasi kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
 6. mengolah data dan informasi hasil penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
 7. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain bidang pengelolaan data, informasi dan perpustakaan;
 8. mengelola perpustakaan dan pengadaan bahan perpustakaan/referensi yang dibutuhkan DPRD;
 9. melaksanakan pelayanan peminjaman buku/produk hukum;
 10. menyiapkan bahan penyusunan abstrak peraturan perundang-undangan;
 11. melaksanakan dan mendistribusikan penerbitan media cetak khusus/buletin DPRD;
 12. melaksanakan pengolahan bahan dokumentasi hukum;
 13. menyiapkan dan menyebarluaskan bahan dokumentasi hukum;
 14. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 15. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1 Meningkatkan kualitas pelayanan Penyaluran Aspirasi Masyarakat kepada Dewan	Jumlah pelaksanaan ases	Jumlah pelaksanaan ases	Laporan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- 1 JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 2 TUGAS : 1. menyusun program dan kegiatan subbagian hukum dan perundangundangan;
2. melaksanakan pengkajian/penelitian produk hukum;
3. menyiapkan bahan penyusunan/perumusan rancangan produk hukum DPRD;
4. mendistribusikan Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah atau atas inisiatif DPRD kepada Anggota DPRD untuk dikaji;
5. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
6. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.	Jumlah Kajian inisiatif DPRD	Jumlah Kajian inisiatif DPRD	Laporan kegiatan Bagian Persidangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- 1 JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
- 2 TUGAS :
 1. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan, penetapan kinerja dan laporan kinerja
 2. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
 3. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 4. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 5. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bagian;
 6. melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bagian;
 7. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
 8. mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
 9. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 10. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Jumlah dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN Jumlah dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah	SUMBER DATA Laporan kegiatan Bagian Keuangan
	Jumlah dokumen anggaran	Jumlah dokumen anggaran		Laporan kegiatan Bagian Keuangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- 1 JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN VERIFIKASI
- 2 TUGAS :
 1. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
 2. mengoordinir dan meneliti anggaran;
 3. menyelenggarakan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas DPRD dan Sekretariat DPRD;
 4. melaksanakan pengendalian pelaksanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
 5. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan kepada bendahara;
 6. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 7. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen sistem tata kelola keuangan	Jumlah dokumen sistem tata kelola keuangan sesuai pedoman	Laporan kegiatan Bagian Keuangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- 1 JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH
- 2 TUGAS : 1. menyusun program dan kegiatan subbagian persidangan dan risalah;
2. menyelenggarakan urusan administrasi rapat;
3. menyusun agenda rapat dan persidangan DPRD dan alat kelengkapan DPRD;
4. memfasilitasi pelaksanaan peninjauan, pertemuan dengan masyarakat dan pertemuan lainnya yang diselenggarakan DPRD;
5. menyusun risalah rapat dan persidangan, pertemuan, peninjauan dan kegiatan lain DPRD;
6. menyiapkan bahan rapat dan persidangan;
7. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan rapat/sidang DPRD dan alat kelengkapan DPRD;
8. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
9. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Penyaluran Aspirasi Masyarakat kepada Dewan	Jumlah Rapat dan persidangan	Jumlah Rapat dan persidangan yang dilaksanakan	Laporan kegiatan Bagian Persidangan
		Jumlah dokumen Risalah	Jumlah dokumen Risalah	Laporan kegiatan Bagian Persidangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- 1 JABATAN : KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN, RISALAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 2 TUGAS merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang-undangan.mengendi.
- 3 FUNGSI :
 1. penyusunan program dan kegiatan Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang-undangan;
 2. menyiapkan bahan pembentukan alat kelengkapan DPRD;
 3. pengoordinasian pelaksanaan sidang/rapat pimpinan dan alat kelengkapan DPRD, peninjauan Dewan serta pertemuan dengan masyarakat;
 4. pelaksanaan penyusunan risalah hasil rapat dan persidangan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD;
 5. menyiapkan rancangan produk hukum Daerah DPRD;
 6. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan produk hukum Daerah atas inisiatif DPRD;
 7. pelaksanaan pengoordinasian dan fasilitasi pengkajian produk hukum;
 8. pelaksanaan sistem dokumentasi produk hukum dan perustakaan;
 9. pelaksanaan penyusunan abstrak peraturan perundang-undangan;
 10. pelaksanaan pemberian informasi produk hukum dan dokumentasi hukum;
 11. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan rapat/sidang DPRD dan alat kelengkapan DPRD; dan
 12. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 13. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Penyaluran Aspirasi Masyarakat kepada Dewan	Jumlah fasilitasi rapat - rapat DPRD	Jumlah fasilitasi rapat - rapat DPRD	Laporan dari Bagian Persidangan, Risalah dan Perundang undangan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- 1 JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
- 2 TUGAS : 1. menyusun program dan kegiatan subbagian rumah tangga dan perlengkapan;
 2. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 3. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
 4. melaksanakan urusan rumah tangga di rumah jabatan Pimpinan DPRD;
 5. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
 6. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
 7. menyiapkan ruangan, peralatan dan jamuan rapat/sidang DPRD;
 8. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 9. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan	1. Jumlah Dokumen pengelolaan aset	Jumlah Dokumen pengelolaan aset	Laporan SIMBAPER

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1 JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

- 2 TUGAS :
1. menyusun program dan kegiatan subbagian administrasi umum;
 2. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 3. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 4. melaksanakan urusan naskah dinas/surat menyurat yang diperlukan oleh DPRD dan Sekretariat DPRD;
 5. melaksanakan pengaturan acara dan akomodasi tamu-tamu yang melakukan kunjungan kerja ke DPRD;
 6. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
 7. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 8. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
 9. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
 10. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
 11. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
 12. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 13. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	1.	2.		
1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan	Jumlah Dokumen pengelolaan kepegawaian	Jumlah Dokumen pengelolaan kepegawaian		Laporan kehadiran pegawai elektronik dan manual
	Persentase tertib tata kelola surat menyurat dan arsip	Persentase tertib tata kelola surat menyurat dan arsip		Laporan pelayanan kepegawaian untuk pegawai

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- 1 JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
- 2 TUGAS : 1. menyusun program dan kegiatan subbagian humas dan protokol;
 2. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
 3. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
 4. menyusun jadwal acara/kegiatan unsur Pimpinan DPRD;
 5. melaksanakan pengaturan acara dan akomodasi tamu-tamu yang melakukan kunjungan kerja ke DPRD;
 6. menyelenggarakan konferensi pers kegiatan DPRD untuk konsumsi Pers;
 7. melaksanakan pemberian informasi dan publikasi kegiatan DPRD;
 8. menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
 9. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan klarifikasi penyampaian informasi serta publikasi kegiatan DPRD;
 10. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 11. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan	1.	Persentase ketepatan jadwal acara / kegiatan unsur pimpinan DPRD	Jumlah acara yang terlaksana sesuai jadwal dibanding jumlah acara terjadual	Laporan Bagian Umum
		2.	Persentase publikasi acara / kegiatan DPRD	Jumlah acara yang terpublikasi dibanding jumlah acara yang terlaksana	Laporan Bagian Umum

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- 1 JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PELAPORAN
- 2 TUGAS : 1. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
2. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
3. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
4. melaksanakan evaluasi terhadap realisasi pengeluaran anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
5. menyusun laporan keuangan;
6. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
7. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.	Jumlah laporan monitoring penyerapan anggaran	Jumlah laporan monitoring realisasi anggaran sesuai pedoman	Laporan SPJ
		2.	Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	- Laporan SPJ, LRA, Neraca, Laporan Persediaan Barang Habis Pakai, LKjIP

RENCANA AKSI TAHUN
2018

RENCANA AKSI
PENCAPAIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2018

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SASARAN I : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DALAM RANGKA MEMFASILITASI SETIAP KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA BALIKPAPAN	Cakupan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	100%	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis Penyediaan surat menyurat	Jenis	4	Rp 3.775.000,00	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran penggunaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jenis	4	Rp 601.600.000,00	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan R4 dan STNK	Unit	roda 4 ; 45 unit dan 12 unit roda 2	Rp 130.000.000,00	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga non PNS	Paket	1	Rp 210.013.000,00	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Jenis	55	Rp 197.775.000,00	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan untuk kegiatan Administrasi dalam 1 tahun	Jenis	19	Rp 420.457.500,00	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik pertahun (jenis)	Jenis	20	Rp 87.830.000,00	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	5	Rp 350.000.000,00	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Galon, minuman, snack dan nasi kotak yang disediakan (buah)	Jenis	12	Rp 6.257.898.500,00	
				Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Kali	100	Rp 20.941.631.000,00	

	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jasa tenaga non pns	Orang	33	Rp	580.483.200,00	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis	3	Rp	213.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor (gedung)	Jenis	2	Rp	479.400.000,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah pemeliharaan rumah jabatan	Jenis	1	Rp	1.516.380.656,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	Jenis	1	Rp	1.006.600.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah unit kendaraan dinas/operasional	Unit	R4 = 45, R2 = 12	Rp	870.000.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah jenis peralatan gedung kantor	Jenis	4	Rp	198.370.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor (gedung)	Jenis	4	Rp	277.200.000,00	
	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas	Jumlah unit mobil dan kendaraan	Unit	R4 = 45, R2 = 12	Rp	602.500.000,00	
Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Dewan)	jumlah jenis pakaian dinas be	Jenis	1	Rp	873.692.000,00	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Setwan	Jumlah SDM Aparatur Setwan	Orang	14	Rp	312.000.000,00	

				Penyusunan Kajian Raperda Inisiatif DPRD Bidang Politik dan Hukum	Jumlah kajian	Kajian	2	Rp 1.114.998.000,00	
				Penyusunan Kajian Raperda Inisiatif DPRD Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan	Jumlah kajian	Kajian	2	Rp 1.393.898.000,00	
				Penyusunan Kajian Raperda Inisiatif DPRD Inisiatif DPRD Bidang Infrastruktur & Transportasi	Jumlah kajian	Kajian	2	Rp 1.580.598.000,00	
				Penyusunan Kajian Raperda Inisiatif DPRD Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Jumlah kajian	Kajian	2	Rp 1.325.998.000,00	
			Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pembaharuan Data Website dan mail Balikpapan.go.id	Frekwensi pembaharuan data wibesite dan mail Balikpapan.go.id	Bulan	12	Rp 20.910.000,00	
				Pengelolaan Data dan Informasi Kegiatan DPRD Kota Balikpapan	Frekwensi pengelolaan data dan informasi keg DPRD Kota Balikpapan	Bulan	12	Rp 30.000.000,00	
				Pengembangan Kerjasama dengan Media Massa	Jumlah kerja sama dengan media massa	Jenis	23	Rp 3.283.800.000,00	
SASARAN II : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT KEPADA DEWAN	Cakupan Layanan Aduan Masyarakat	100%	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Kegiatan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses	Kegiatan	3	Rp 2.700.000.000,00	
SASARAN III : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	B	Perencanaan Pembangunan	Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Laporan	5	-	

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rapat-rapat Paripurna	Jumlah Dokumen Risalah	Buku	100	Rp	70.900.000,00
	Rapat Kerja	Jumlah Dokumen Rapat Kerja	Dokumen	1	Rp	151.534.000,00
	Peningkatan Kompetensi Badan Musyawarah Kota Balikpapan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Badan Musyawarah yang mengikuti kompetensi	Orang	23	Rp	882.000.000,00
	Panitia Khusus/Panitia Kerja DPRD Kota Balikpapan	Jumlah Rekomendasi Panitia Khusus (Buku Laporan Kegiatan/ Rekomendasi)	Rekom	3	Rp	720.000.000,00
	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Anggaran	Jumlah Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran yang mengikuti kompetensi	Orang	23	Rp	1.492.353.000,00
	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kehormatan	Jumlah Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran yang mengikuti kompetensi	Orang	5	Rp	698.270.000,00
	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Kajian-Kajian	Jumlah Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran yang mengikuti kompetensi	Orang	23	Rp	1.819.565.000,00
	Peningkatan Kompetensi Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD (Adeksi)	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan yang mengikuti kompetensi	Orang	45	Rp	2.655.650.000,00
	Penyediaan Tenaga Ahli Pimpinan dan Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli	Orang	10	Rp	480.000.000,00

LHE AKIP
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2018

KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DEWAN

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y	NILAI	
1	2		3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	39,71%	11,91	
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)		10,00	37,12%	3,71	
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)		2,00	77,78%	1,56	
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1,00	
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1,00	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		E	-	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		E	-	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1,00	OK
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
b. KUALITAS RENSTRA (5%)		5,00	28,13%	1,41	
10	Tujuan telah berorientasi hasil		B	0,75	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		E	-	OK
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		B	0,75	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		E	-	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		D	0,25	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		E	-	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		D	0,25	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		D	0,25	OK
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)		3,00	25,00%	0,75	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		D	0,25	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		D	0,25	OK
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		D	0,25	OK
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20,00	41,00%	8,20	
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)		4,00	93,75%	3,75	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00	OK
3	PK telah menyajikan IKU		B	0,75	OK
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)		10,00	32,50%	3,25	
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		C	0,50	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		E	-	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		E	-	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		E	-	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		E	-	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		E	-	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		E	-	OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00	OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		B	0,75	OK
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00	OK

c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6,00	20,00%	1,20	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		T	-	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		D	0,25	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		D	0,25	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		D	0,25	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		D	0,25	OK
	B. PENGUKURAN KINERJA (25%)	25,00	38,75%	9,69	
	I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5,00	81,25%	4,06	
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal</i>		Y	1,00	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		B	0,75	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		C	0,50	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
	II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12,50	37,50%	4,69	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		C	0,50	OK
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		E	-	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		C	0,50	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0,75	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		D	0,25	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		C	0,50	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		C	0,50	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		T	-	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		T	-	OK
	III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)	7,50	12,50%	0,94	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		D	0,25	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		C	-	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		C	-	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>		D	0,25	OK
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		D	0,25	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		C	-	OK
	C. PELAPORAN KINERJA (15%)	15,00	67,14%	10,07	
	I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)	3,00	100,00%	3,00	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1,00	OK
	II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)	7,50	58,29%	4,37	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>outcome</i>		A	1,00	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		B	0,75	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		C	0,50	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		C	0,50	OK

9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0,33	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		C	0,50	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		C	0,50	OK
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4,50	60,00%	2,70	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00	OK
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		C	0,50	OK
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		C	0,50	OK
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		C	0,50	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0,50	OK
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10,00	28,75%	2,88	
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2,00	62,50%	1,25	
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1,00	
2	<i>Evaluasi program</i> telah dilakukan		Y	1,00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		D	-	OK
4	<i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan		C	0,50	OK
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5,00	25,00%	1,25	
5	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		C	0,50	OK
6	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0,50	OK
7	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0,50	OK
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		E	-	OK
9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		E	-	OK
10	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah menunjukkan perbaikan setiap periode		D	-	OK
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3,00	12,50%	0,38	
11	Hasil evaluasi <u>program</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		D	0,25	OK
12	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		E	-	OK
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20,00	38,33%	7,67	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7,50	46,67%	3,50	
1	Target dapat dicapai		B	2,00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		C	0,50	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		C	1,00	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12,50	83,33%	4,17	
4	Target dapat dicapai			2,50	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			0,83	
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			0,83	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	42,21%	42,21	

NILAI HASIL EVALUASI SISTEM AKIP

42,21